

Analisis yuridis sengketa peralihan hak rumah dengan surat ijin perumahan yang didirikan di atas tanah sewa eks Kotapraja Jakarta : studi kasus Putusan putusan Mahkamah Agung no. 2437 K/PDT/2009 = Legal analysis on the dispute of housing with housing license built on the land leasing ex Jakarta regency : case study of Supreme Court Decision no. 2437 K/PDT/2009 / Endah Palupi

Palupi, Endah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364984&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewa tanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri di atasnya. Demikian halnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yang menimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal dan hak sewa atas tanahnya kepada pihak lain, yang berujung pada diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan. Permasalahan hukum tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahasnya dalam tesis ini dengan judul Analisis Yuridis Sengketa Rumah Dengan Surat Ijin Perumahan Yang Didirikan Diatas Sewa Tanah Eks Kotapraja Jakarta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/PDT/2009).

<hr>

ABSTRACT

The Land Leasing Agreement often creates conflicts whenever one party claiming as the owner of the building built there on. The same thing occurs with the house leasing and the housing license which create a conflict between the leasee and lessor who claim as the owner of the house building. This issue leads into each party to transfer the rights over the house building and the leasing right over the land to other party, which eventually the issue is now being submitted to the court.

These legal issues are interesting for the writer to be discussed and elaborated more in the Thesis, with title :

“ Legal Analysis on The Dispute of Housing with Housing License Built on The Land Leasing Ex Jakarta Regency”

(Case Study of Supreme Court Decision No. 2437 K/PDT/2009.